



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Pastikan Pengusutan Dana Hibah KPU Tetap Berlanjut

**KAUR** - Pengusutan dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Kaur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaur Rp 25 miliar, masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kaur. Beberapa waktu lalu Seksi Intelijen Kejari Kaur melimpahkan kasus ini ke Seksi Pidana Khusus. Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH, melalui Kasi Intel M. Gufron, SH, MH, mengatakan dugaan kasus korupsi tersebut masih dalam penyelidikan Seksi Pidsus, jika cukup bukti maka dalam waktu dekat segera dinaikan ke penyidikan. Agar kasus tersebut jelas arah hukumnya. "Yang pastinya kasus ini tetap kita proses," katanya.

Dia menjelaskan, selama ini kasus tersebut masih pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Seksi Intelijen telah memeriksa seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kaur dan beberapa staf KPU yang diduga mengetahui tentang dana tersebut.

"Hasil dari pemeriksaan para saksi maka kita berpendapat kasus ini perlu dinaikkan ke Seksi Pidsus untuk penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Ditambahkan Nurhadi Puspandoyo, setelah kasus tersebut ditangani oleh Seksi Pidsus maka ia berkomitmen untuk menemukan titik terang kasus tersebut.

"Kita akan berupaya untuk menemukan titik terang kasus ini, maka jika Seksi Pidsus telah mendapatkan bukti kuat atas dugaan kasus tersebut untuk segera dinaikkan status menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangka," sampainya

Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kaur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 25 miliar, diperuntukkan penyelenggaraan

Pemilu Kepala Daerah Kaur tahun 2020, hanya tersisa hanya Rp 9,9 juta. Kendati demikian, dana hibah total itu tidak keseluruhan dikelola oleh KPU Kaur. Dana tersebut juga dipergunakan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungut Suara (PPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (wii)